



LAPORAN KINERJA

KPKNL TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2021
(1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2021)



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TASIKMALAYA**

03 JANUARI 2022



Handwritten signature or mark.

DAFTAR ISI

COVER	1
DAFTAR ISI	2
KATA PENGANTAR	3
BAB I	PENDAHULUAN	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	12
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	14
	A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	14
	A.1 Membandingkan antara target dan realisasi tahun 2021	14
	A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dan tahun sebelumnya	16
	A.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	19
	A.4 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	23
	A.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja	23
	A.6 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi (mitigasi risiko) yang telah disusun dalam pencapaian target	24
	A.7 Rencana Aksi	24
	B. REALISASI ANGGARAN	25
BAB IV	PENUTUP	26

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 (LAKIN) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya ini disusun sebagai pertanggungjawaban dalam pencapaian visi dan misi DJKN selama tahun anggaran 2021. Dalam pelaksanaan tugas untuk pencapaian kinerja KPKNL Tasikmalaya selalu mengacu pada visi DJKN yaitu : **"Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"**.

LAKIN mempunyai beberapa fungsi antara lain merupakan alat penilai kinerja secara kuantitatif, sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Tasikmalaya menuju *good governance*, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat. Di sisi lain, LAKIN merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DJKN.

Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, KPKNL Tasikmalaya telah menerapkan sistem *Balance Scorecard (BSC)* sebagai alat manajemen kinerja. Performa KPKNL Tasikmalaya dinilai berdasarkan pengukuran indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan kontrak kinerja Kepala KPKNL Tasikmalaya dengan Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat tahun 2021. Oleh karena itu, pengukuran kinerja dalam LAKIN Tahun 2021 ini adalah berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC.

Dapat kami sampaikan bahwa LAKIN 2021 KPKNL Tasikmalaya ini dibuat dengan mengacu pada Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2021 dan juga berdasarkan Sasaran Strategis (SS) serta Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Sesuai Kontrak Kinerja tahun 2021 KPKNL Tasikmalaya memiliki sebanyak 20 IKU yang seluruhnya memenuhi target. Terjadinya pandemi *Covid-19* yang masih berlangsung di sepanjang tahun 2021 menjadi salah satu tantangan yang tidak hanya dihadapi oleh KPKNL Tasikmalaya namun dialami oleh semua pihak. Dalam hal ini KPKNL Tasikmalaya berusaha memberikan pelayanan yang optimal, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan penularan *Covid-19* dengan berbagai inovasi layanan, seperti mengoptimalkan pelayanan secara *online* serta penerapan WFO dan WFH bagi para pegawai.

Tersusunnya LAKIN 2021 ini merupakan hasil kerjasama dan dukungan dari seluruh jajaran KPKNL Tasikmalaya. Apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran KPKNL Tasikmalaya yang juga telah bersinergi mendukung pencapaian visi dan misi DJKN. Kami berharap LAKIN Tahun 2021 ini dapat menjadi salah satu acuan dalam meningkatkan kinerja KPKNL Tasikmalaya di masa yang akan datang.

Tasikmalaya, Januari 2022
Kepala Kantor


Laesintje Wilar

BAB I

PENDAHULUAN

Seiring dengan adanya Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai salah satu bagian Kementerian Keuangan memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya sebagai instansi vertikal DJKN merupakan ujung tombak yang langsung berhubungan dengan masyarakat pengguna jasa. Mengingat sangat pentingnya peran tersebut, KPKNL Tasikmalaya melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kinerja secara sistematis dan berkesinambungan dengan memaksimalkan segenap keterbatasan sumber daya yang ada secara sinergis dan komprehensif sehingga tercipta sikap kerja yang profesional, akuntabel, transparan sesuai dengan tuntutan masyarakat sehingga dapat menjadi kantor pelayanan yang dibanggakan oleh masyarakat.

Salah satu langkah kongkrit yang dilakukan oleh KPKNL Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas tersebut adalah dengan melaksanakan secara konsisten berbagai kebijakan di bidang pelayanan kepada masyarakat, dengan berpedoman pada:

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.
3. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
4. Keputusan Menteri keuangan Nomor : 30/KMK.01/2007 tentang Reformasi Birokrasi Departemen keuangan

Selain hal tersebut di atas, sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, KPKNL Tasikmalaya menjadi salah satu pilar dalam Reformasi Keuangan Negara yang dicanangkan oleh Menteri Keuangan. Dengan dilandasi oleh tiga regulasi utama di bidang keuangan negara, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai Kantor yang telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di tahun 2019, KPKNL Tasikmalaya selalu berusaha menjaga integritasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menghindari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta praktik penerimaan gratifikasi di semua jenis pelayanannya, baik di bidang pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang, dalam rangka meningkatkan penerimaan negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang serta melakukan pengamanan kekayaan negara dengan melakukan pengadministrasian dan penilaian aset negara. Dengan selalu menjunjung tinggi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan maksimal, KPKNL Tasikmalaya terus berupaya untuk menjadi Kantor Pelayanan terbaik dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara dan lelang.

Untuk memberikan arah, inspirasi serta menjaga semangat kerja seluruh jajarannya, KPKNL Tasikmalaya memiliki visi dan misi sebagai berikut :

VISI :

“Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

MISI :

1. ***Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas Pengelolaan Kekayaan Negara;***
2. ***Mengamankan Kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum;***
3. ***Mewujudkan Nilai Kekayaan Negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;***
4. ***Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;***

5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.135/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah DJKN dan KPKNL, mempunyai **Tugas** melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam melaksanakan tugas tersebut KPKNL Tasikmalaya menyelenggarakan fungsi:

1. *Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;*
2. Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
4. Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/ penjamin hutang;
5. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/ atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
6. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
7. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
8. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
9. *Pelaksanaan pelayanan lelang;*
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
14. Pelaksanaan administrasi KPKNL.

Salah satu cara untuk menjaga agar dalam melaksanakan proses bisnisnya bisa berjalan sesuai dengan peraturan dan SOP yang ada, KPKNL Tasikmalaya mengambil langkah dengan mengoptimalkan tugas dan fungsi seksi Kepatuhan Internal.

Ada 11 (sebelas) Kegiatan yang dipantau dalam Pemantauan Pengendalian Utama yang seluruhnya merupakan layanan unggulan, yaitu :

1. Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan;
2. Persetujuan/Penolakan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan;
3. Verifikasi dan Analisis Permohonan Penilaian;
4. Penyusunan Laporan Penilaian;
5. Penetapan Jadwal Lelang;
6. Pelaksanaan Lelang;
7. Pelayanan Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang;
8. Pelayanan Pemberian Kuitansi Pembayaran Harga Lelang;
9. Pelayanan Pemberian Kutipan Risalah Lelang dan Dokumen Kepemilikan Barang;
10. Penyetoran Hasil Bersih Kepada Penjual Melalui Bendahara Penerimaan;
11. Penyusunan Minuta Risalah Lelang.

Selama ini seksi Kepatuhan Internal melakukan fungsi Pemantauan Pengendalian Utama dengan cara :

1. PPU berupa reviu dokumen dituangkan dalam DUPU (Daftar Uji Pengendalian Utama) dan terangkum dalam LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) dwimingguan, bulanan, triwulanan dan semesteran.
2. Pelaksanaan Observasi yang dilaksanakan minimal 1 (satu) Bulan sekali per kegiatan yang dipantau. Dituangkan dalam TOPU (Tabel Observasi Pengendalian Utama).

Feedback Utama dari Pemilik dan Pelaksana Pengendalian

- Pelaksanaan PPU dapat membantu mengidentifikasi adanya pengendalian utama yang tidak dilaksanakan;
- Pelaksanaan PPU dapat membantu mengidentifikasi adanya indikasi kesalahan maupun kecurangan (*fraud*);
- Dengan adanya pelaksanaan PPU, pegawai semakin berhati-hati dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan pejabat lebih teliti dalam mengawasi pekerjaan;

- Rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan dapat membantu mengatasi permasalahan karena lebih objektif;
- Manfaat yang dirasakan dengan adanya pelaksanaan PPU antara lain: kinerja lebih terkendali, pelaksanaan pekerjaan lebih tertib, dan pejabat/pegawai bekerja lebih teliti dan cermat sesuai ketentuan;
- Pelaksanaan PPU tidak menghambat pekerjaan sehari-hari selama permintaan berkas sesuai dengan keperluan dan adanya koordinasi yang baik;
- Pemilik pengendalian menyarankan agar hasil pemantauan dapat direkapitulasi secara tertulis dan disampaikan kepada Pemilik Pengendalian sehingga bisa menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kinerja

Sudah barang tentu dalam menjalankan tugas dan fungsinya (proses bisnis) dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasi, KPKNL Tasikmalaya mengalami beberapa hambatan/permasalahan, antara lain :

a. Permasalahan di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara :

Meskipun selama ini KPKNL Tasikmalaya selalu berhasil mencapai target di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, namun demikian kenyataan di lapangan ada beberapa kendala/permasalahan yang timbul, yaitu :

1. Pengawasan dan Pengendalian BMN (Wasdal)

Permasalahan :

- Masih kurangnya kesadaran satker-satker dalam menyampaikan laporan wasdal kepada KPKNL.
- Tidak terdapat sanksi yang bagi satker-satker yang tidak menyampaikan laporan wasdal.

2. Pengelolaan BMN.

Permasalahan :

- Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara parsial sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan;
- Masih terdapat syarat permohonan yang diajukan kurang lengkap, sehingga perlu dilakukan permintaan kelengkapan berkas yang membutuhkan waktu lama.
- Masih kurangnya kesadaran sebagian satker pada Kementerian/Lembaga dalam pengajuan permohonan pengelolaan BMN, sehingga untuk pengguna barang tertentu masih sangat sedikit pengajuannya.

- Khusus satker TNI, masih banyak BMN yang telah dilakukan pemanfaatan namun belum diajukan permohonannya kepada pengelola barang. Hal ini disebabkan karena panjangnya birokrasi serta adanya sistem komando di lingkungan TNI .
- Untuk Pemanfaatan Sewa Bahwa Target Tidak Sebanding Dengan Potensi yang ada di KPKNL Tasikmalaya,
- Penerimaan yang berasal dari Hibah tidak termasuk ke dalam capaian PNBPKN;

3. Aplikasi.

Permasalahan aplikasi pada PKN lebih banyak terjadi pada penerapan aplikasi SIMAN di antara permasalahan tersebut adalah :

- Masih banyak menu dalam aplikasi SIMAN yang belum sempurna, sehingga sampai saat ini belum dapat diterapkan dengan baik.
- Aplikasi SIMAN memerlukan koneksi internet yang cepat, dan di saat bersamaan koneksi internet pada satuan kerja maupun KPKNL masih cukup lambat, sehingga menyebabkan *uploading* data sering kali tidak berhasil serta harus dilakukan beberapa kali, namun hal ini telah di atasi oleh KPKNL Tasikmalaya dengan pemasangan jaringan internet tambahan.
- Aplikasi SIMAN memerlukan spesifikasi Komputer/Laptop yang tinggi, sehingga tidak semua satker mempunyai fasilitas yang sesuai dipersyaratkan.

b. Permasalahan di Bidang Pengurusan Piutang Negara :

Permasalahan di bidang pengurusan piutang negara ini sangat erat hubungannya dengan pencapaian target baik target PNDP maupun target BIAD PPN dan BKPN yang sekarang ada dalam pengurusan KPKNL Tasikmalaya sebagian besar merupakan BKPN yang tidak lengkap, yaitu BKPN yang tanpa dilengkapi dengan Barang Jaminan dan jikapun ada, barang jaminan tersebut tidak didukung dengan bukti kepemilikan yang kuat ditambah dengan kondisi debitur yang rata-rata pailit dan tidak mampu serta sebagian besar piutang yang merupakan piutang kredit pemerintah.

Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan, dan atau ada jaminan namun hanya berupa *letter C*, Seksi PN telah melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang. Hal ini guna meminta pertanggung jawaban Penyerah Piutang atas upaya mereka dalam melaksanakan penyelesaian BKPN yang diserahkan kepada PUPN. Hal ini perlu dilakukan agar terjadi kerjasama yang saling

menguntungkan antara pihak penyerah piutang dengan KPKNL Tasikmalaya karena masing-masing pihak memiliki target terkait penyelesaian piutang.

c. Permasalahan di Bidang Pelayanan Penilaian :

Pada bidang penilaian sebenarnya tidak ditemukan masalah atau kendala yang berarti, dan selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya. Namun ada sedikit kesulitan dalam pencapaian target laporan dikarenakan jumlah laporan sangat tergantung dari jumlah permohonan dari satker. Permohonan dari satker tidak dapat diprediksikan. Upaya yang selama ini sudah diambil oleh KPKNL Tasikmalaya adalah dengan melakukan penggalan potensi ke Pemerintah Daerah di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya untuk memanfaatkan jasa penilaian melalui KPKNL, dan hal ini sudah mendapatkan hasil tanggapan yang baik dari Pemerintah Daerah tersebut.

d. Permasalahan di Bidang Pelayanan Lelang

Permasalahan yang sering dihadapi di bidang pelayanan lelang antara lain :

- Banyaknya frekuensi lelang Tidak Ada Peminat sebagai Risiko paling tinggi apabila dikaitkan dengan capaian target hasil lelang. Hal ini terutama terjadi pada lelang eksekusi hak tanggungan yang nilainya cukup besar. Dengan Pelaksanaan lelang Sukarela khususnya melalui Kedai Lelang UMKM yang dilaksanakan secara rutin dua kali dalam satu bulan, KPKNL Tasikmalaya dapat meningkatkan capaian kinerja Produktifitas lelang.
- Dalam hal lelang *via internet (open dan closed bidding)*, kendala muncul dari masyarakat pengguna jasa lelang yang mengalami kesulitan dalam registrasi dan tata cara mengikutinya. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap teknologi informasi/ internet. Seiring dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di tahun 2021, dengan tujuan penerapan Protokol Kesehatan untuk mencegah penyebaran Covid-19 memungkinkan KPKNL Tasikmalaya memanfaatkan momentum tersebut untuk lebih memasyarakatkan lelang secara *online*.

e. Permasalahan di Bidang Hukum dan Informasi :

1. Pada aplikasi Aplikasi *Focus PN*, terkendala masalah input data pada aplikasi dimana Seksi Hukum & Informasi harus menunggu Seksi Piutang Negara melakukan input data terlebih dahulu.
2. Pada Aplikasi *Sibankum* terkendala dalam hal form Laporan yang tidak menyediakan kolom Pengadilan Agama.
3. Semakin beranekaragamnya sarana publikasi yang bisa dijadikan sarana publikasi (*Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll*) di satu sisi menjadi peluang untuk bisa memaksimalkan penyebaran informasi kepada masyarakat, di sisi lain terbatasnya Sumber Daya yang dimiliki sebagai pengelola (*Admin dan Content Creator*) seluruh kanal tersebut.
4. Belum optimalnya peran seluruh pegawai dalam mendukung kegiatan publikasi dan kehumasan. Hal ini terlihat dari kurangnya antusiasme pegawai dalam merespon setiap publikasi berita kegiatan maupun kontribusi atas isi konten berita/artikel di Portal maupun sosial media milik kantor terkait tugas dan fungsi masing-masing.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada akhir Tahun Anggaran 2020 KPKNL Tasikmalaya telah menyusun rencana kinerja untuk Tahun Anggaran 2021, dan mengusulkan rencana target untuk Tahun 2021 kepada Kantor Pusat DJKN. Dari usulan tersebut akhirnya Kantor Pusat DJKN menetapkan target Tahun Anggaran 2021 untuk KPKNL Tasikmalaya. Target tersebut dituangkan dalam Kontrak Kinerja dan dijabarkan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Adapun ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun Anggaran 2021 KPKNL Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
1	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal								
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	
1b-CP	Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan KN dan Lelang (PNBP)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	
1c-CP	Persentase Penurunan Nilai <i>Outstanding</i> Piutang Negara	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa								
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	87	87	87	87	87	87	87	
2b-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang <i>Agile</i>, Efektif, dan Efisien								
3a-CP	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL	-	-	-	-	-	4,62	4,62	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif								
4a-CP	Persentase Bidang tanah BMN yang disertifikasi	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	
4b-CP	Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	
4c-CP	Deviasi Ketergunaan hasil Penilaian	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	

No	SS, IKU	Target							
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y	
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif								
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	
5b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	
5c-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang E-Auction dan E-Conventional Auction	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	
5d-CP	Deviasi Data PNPB Fungsional DJKN	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	
6	Edukasi yang Efektif								
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	-	94,75	94,75	-	94,75	94,75	94,75	
7	Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif								
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	-	40%	40%	-	40%	85%	85%	
8	SDM yang Kompeten								
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	
9	Organisasi yang Fit For Purpose								
9a-N	Nilai Pemenuhan Unit Kerja terhadap kriteria ZI menuju WBBM	-	-	-	-	-	85	85	
9b-N	Nilai Reviu Pengelolaan Kinerja	-	-	-	-	-	75	75	
9c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	80	80	80	80	80	80	80	
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal								
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

A.1 Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 ini KPKNL Tasikmalaya bisa mencapai seluruh target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 110,76%. Lebih jelasnya di bawah ini adalah gambaran tentang perbandingan antara target dan realisasi di Tahun Anggaran 2021 :

Kode	IKU	V/C	Target s.d. Q4	Realisasi s.d. Q4	Bobot Awal	Bobot Akhir IKU	Indeks Tanpa Batas	Indeks Max. 120%	Ket.
Stakeholder Perspective(25%)								27,67%	
1	Pengelolaan kekayaan negara yang optimal							110,67%	
1a-CP	Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK	P/L	62%	68,57%	19%	40%	110,593%	110,59%	hijau
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	101,43%	14%	30%	101,434%	101,43%	hijau
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	P/M	100%	128%	14%	30%	127,95%	120,00%	hijau
Customer Perspective(15%)								16,74%	
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							115,82%	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	P/H	87	96,13	11%	44%	110,49%	110,49%	hijau
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/M	100%	153,19%	14%	56%	153,19%	120,00%	hijau
3	Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien							107,36%	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	E/M	4,62	4,96	21%	100%	107,36%	107,36%	hijau
Internal Process Perspective (30%)								32,47%	
4	Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							111,67%	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan	P/L	100%	100,70%	19%	43%	100,70%	100,70%	hijau
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi	P/H	100%	120,13%	11%	25%	120,13%	120,00%	hijau

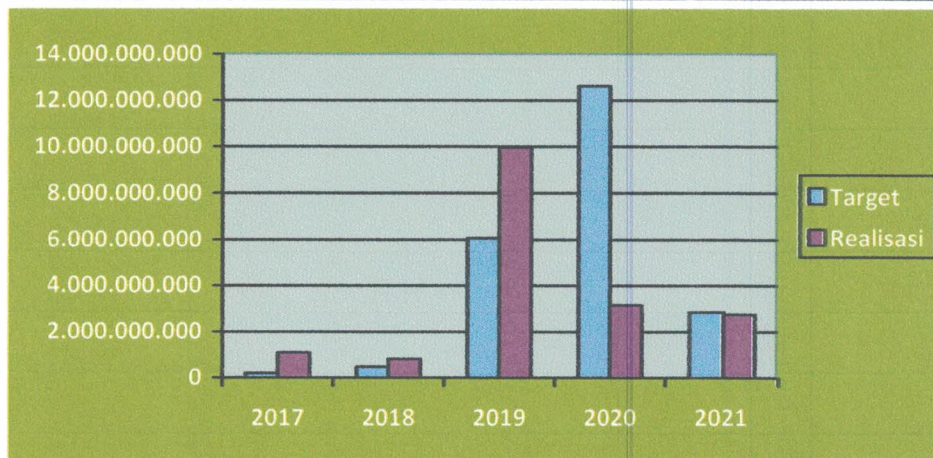
	kinerja BMN (portofolio aset)								
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	P/M	22%	0,00%	14%	32%	200,00%	120,00%	hijau
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							108,32%	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	P/M	100%	107,44%	14%	25%	107,44%	107,44%	hijau
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	35,00%	35,51%	14%	25%	101,45%	101,45%	hijau
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	P/M	92,00%	96,04%	14%	25%	104,39%	104,39%	hijau
5d-CP	Deviasi Data PNBPFungsional DJKN	P/M	12,50%	0,00%	14%	25%	200,00%	120,00%	hijau
6	Edukasi yang efektif							100,71%	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	95	95,43	14%	100%	100,71%	100,71%	hijau
7	Pengawasan dan pengendalian yang efektif							112,18%	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan kekayaan negara	P/M	85%	95,35%	14%	100%	112,18%	112,18%	hijau
	<i>Learning & Growth Perspective (30%)</i>							33,89%	
8	SDM yang kompeten							120,00%	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	100%	120,00%	14%	100%	120,00%	120,00%	hijau
9	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							118,75%	
9a-N	Nilai pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI menuju WBK/WBBM	P/M	85	98,80	14%	33%	116,24%	116,24%	hijau
9b-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja	P/M	75	96,52	14%	33%	128,69%	120,00%	hijau
11c-N	Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	P/M	80	96,55	14%	33%	120,69%	120,00%	hijau
10	Pengelolaan Keuangan yang Optimal							100,12%	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	P/M	95,5%	95,61%	14%	100%	100,12%	100,12%	hijau
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)							110,76%	hijau

A.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 dengan beberapa tahun sebelumnya.

Berikut adalah perbandingan capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun 2021 dengan capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya :

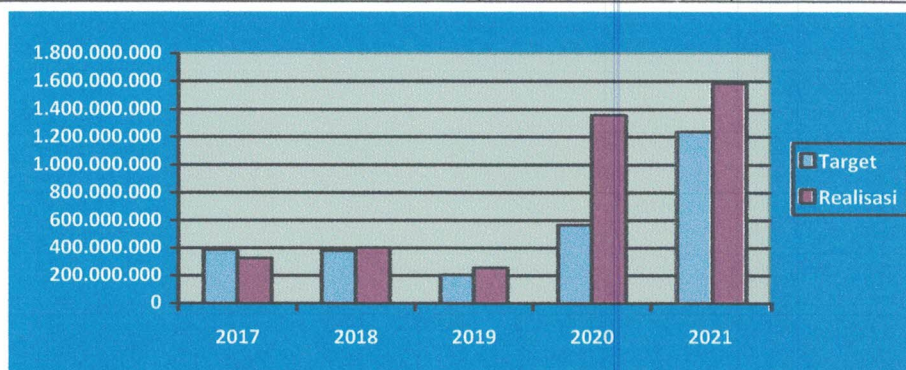
PNBP Pengelolaan BMN

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	200.000.000	1.091.541.058	545,77%
2	2018	500.000.000	829.409.366	165,88%
3	2019	6.074.194.494	9.948.799.037	163,79%
4	2020	12.620.390.000	3.158.591.733	25,03%
5	2021	2.854.000.000	2.738.822.945	95,96%



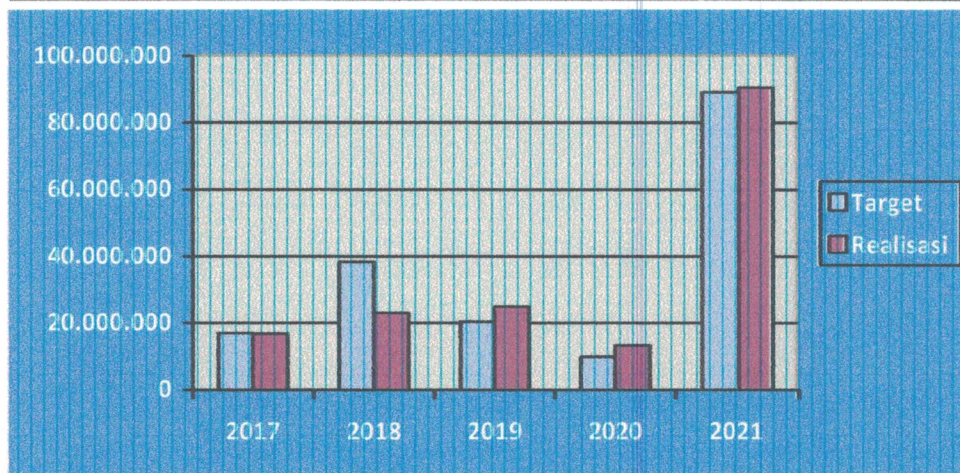
PNDS

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	387.695.458	325.291.893	83,90%
2	2018	382.354.432	401.756.436	105,07%
3	2019	203.050.543	255.935.363	126,05%
4	2020	566.764.696	1.358.389.682	239,67%
5	2021	1.238.777.221	1.584.959.935	127,95%



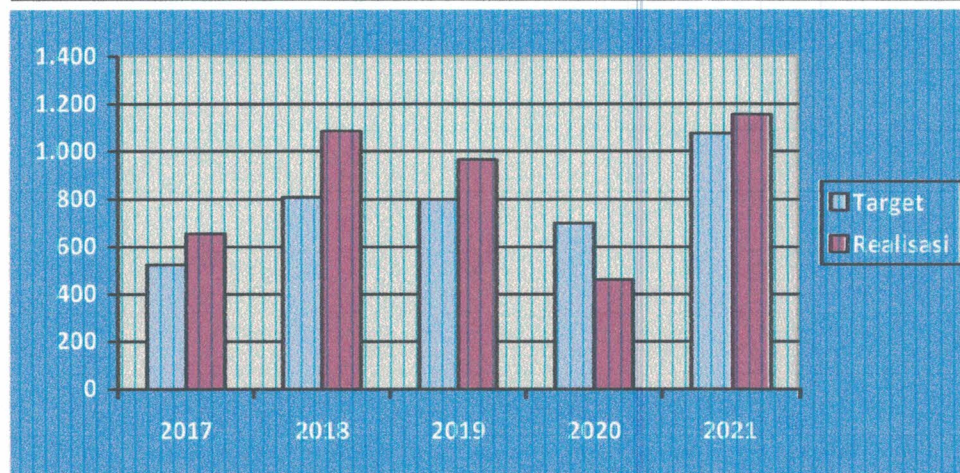
BIAYA ADMINISTRASI PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	17.027.806	16.756.634	98,41%
2	2018	38.352.821.1	23.066.536	60,14%
3	2019	20.394.073	25.002.686	122,60%
4	2020	10.000.000	13.402.508	134,03%
5	2021	89.000.000	90.367.154	101,54%



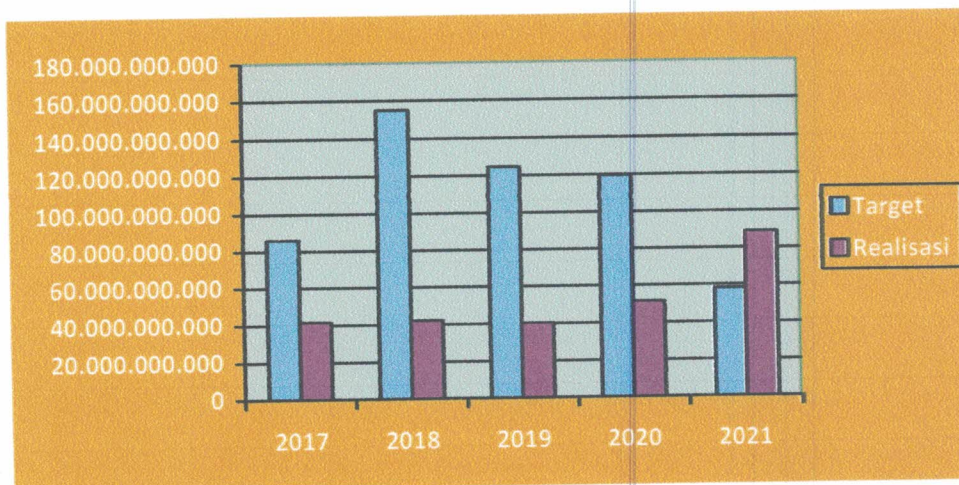
BKPN YANG DAPAT DISELESAIKAN

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	522	655	125,48%
2	2018	810	1.086	134,07%
3	2019	800	966	120,75%
4	2020	700	460	42,64%
5	2021	1075	1155	107,44%



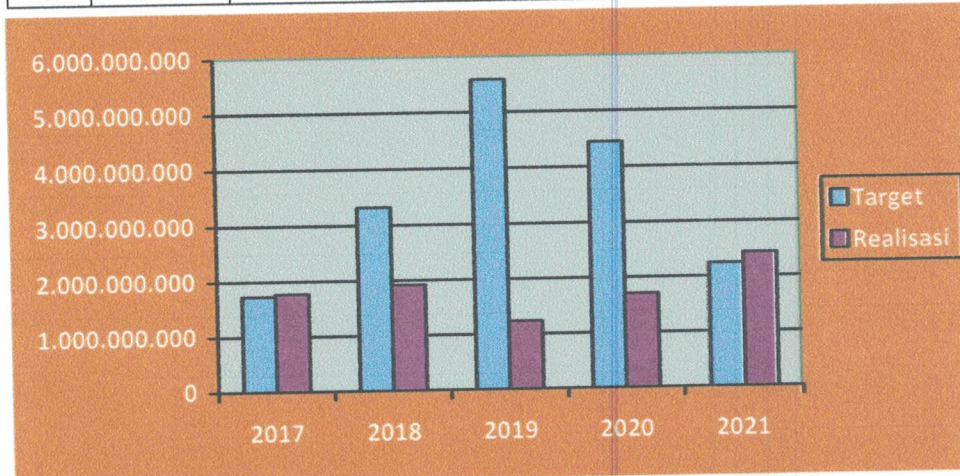
POKOK LELANG

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	86.095.000.000	41.816.619.150	48,57%
2	2018	155.044.000.000	42.251.950.439	27,25%
3	2019	124.607.000.000	40.295.273.819	32,34%
4	2020	119.612.000.000	51.324.847.247	42,91%
5	2021	58.000.000.000	88.851.241.809	153,19%



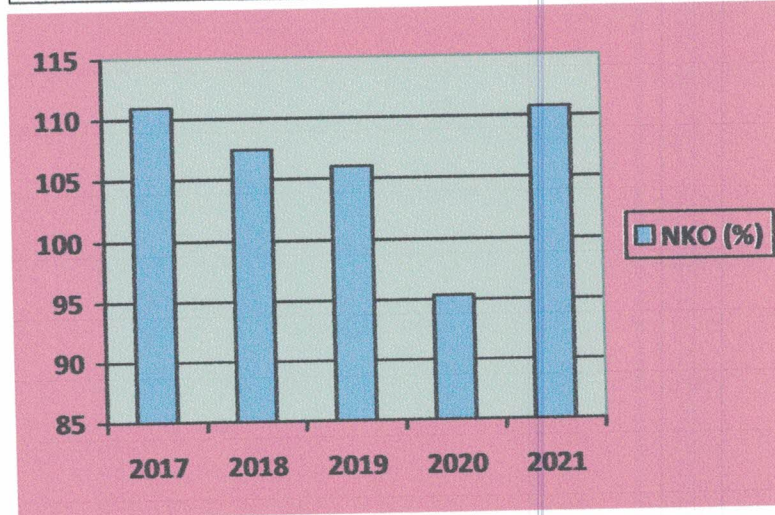
BEA LELANG

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE
1	2017	1.732.000.000	1.773.280.980	102,38%
2	2018	3.328.467.000	1.917.388.096	57,61%
3	2019	5.588.953.888	1.237.378.375	22,14%
4	2020	4.445.000.000	1.703.678.398	38,33%
5	2021	2.239.000.000	2.427.123.439	108,40%



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

NO	TAHUN	NKO
1	2017	110,97%
2	2018	107,44%
3	2019	106,02%
4	2020	95,37%
5	2021	110,76%



A.3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :

1. Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara:

Selama ini kinerja KPKNL Tasikmalaya dalam hal pengelolaan kekayaan negara cukup berhasil, baik dalam mencapai target maupun dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa layanan. Penyebab keberhasilan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara ini ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal yaitu :

- Dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Sumber daya manusia yang semakin lama semakin menguasai dalam segala hal tentang pengelolaan kekayaan negara
- Peraturan yang sederhana, mudah dan tidak menyulitkan dalam hal pengelolaan kekayaan negara

- Adanya kegiatan diklat dan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM dalam hal pengelolaan kekayaan negara
- Adanya penghargaan dan dukungan yang baik dan penuh dari pimpinan organisasi, sehingga bisa memunculkan spirit dan motivasi yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan.
- SDM yang selalu menerapkan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam memberikan pelayanan kepada para satker/pengguna jasa sehingga akan mewujudkan pelayanan prima.
- Terakhir dari dalam diri SDM itu sendiri, yaitu adanya niat baik dan rasa ikhlas serta kepatuhan terhadap SOP yang ada untuk memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa.

Faktor Eksternal yaitu :

- Semakin timbulnya kesadaran yang baik dari para satker/pengguna jasa tentang *pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang tertib*.
- Terciptanya hubungan dan kerja sama serta komunikasi yang harmonis dengan para satker/pengguna jasa.

Sedangkan apabila terjadi kegagalan atau penurunan kinerja penyebabnya tidak lain adalah kebalikan dari penyebab keberhasilan tersebut, ditambah dengan adanya peraturan-peraturan yang belum dipahami oleh satker/pengguna jasa atau peraturan-peraturan yang belum mengakomodir beberapa hal teknis terkait pengelolaan kekayaan negara.

Untuk menghindari terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, KPKNL Tasikmalaya telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya, yaitu :

- Selalu berusaha menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- Selalu memberikan dukungan penuh dan penghargaan yang baik kepada para pegawai
- Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan kepada pegawai agar pegawai senantiasa memberikan pelayanan prima kepada para pengguna jasa.
- Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan kekayaan negara yang tertib secara terjadwal dan berkesinambungan kepada para satker/pengguna jasa.
- Senantiasa menekankan pentingnya Nilai-Nilai Kementerian Keuangan kepada para pegawainya dalam segala bidang pelayanan.

2. Bidang Pengurusan Piutang Negara.

Pada Tahun Anggaran 2021 ini kinerja KPKNL Tasikmalaya di bidang pengurusan piutang negara sudah optimal, seluruh IKU terkait pengurusan piutang negara telah melebihi target. Beberapa hal yang pada periode sebelumnya menjadi kendala dapat diatasi, yaitu :

- Kondisi BKPN yang bermasalah dan tidak lengkap serta tidak didukung dengan jaminan, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja, semangat dan motivasi petugas/pegawai/pemegang berkas
- Sebagian besar penanggung hutang/debitur tidak mempunyai kemampuan usaha dan finansial untuk menyelesaikan hutangnya
- Kurangnya penyerahan BKPN Baru

Hal tersebut dapat diatasi oleh KPKNL Tasikmalaya dengan melakukan beberapa langkah yaitu :

- *Selalu berusaha memberikan dukungan sarana dan prasarana yang diperlukan.*
- Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga.
- Selalu mengikutkan pegawai apabila ada kegiatan diklat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM.
- Penggalian potensi piutang Pemerintah Daerah, dengan cara melakukan sosialisasi ke Pemda di wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.
- Penggalian potensi piutang Pemerintah Daerah.

Adanya *Crash Program* Keringanan Utang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor: 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021, sebagai salah satu faktor yang membantu meningkatnya kinerja pengurusan piutang negara.

3. Bidang Pelayanan Lelang

Di bidang pelayanan lelang, secara keseluruhan kinerja KPKNL Tasikmalaya juga sudah optimal. Terlihat dari seluruh capaian IKU terkait lelang telah melebihi target. Beberapa hal yang pada periode sebelumnya menjadi kendala dapat diatasi, yaitu :

Faktor internal yaitu :

- Kurangnya sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka kepada masyarakat karena terjadinya pandemi *Covid-19* di sepanjang tahun 2021.
- Tidak tercapainya target pokok lelang karena distribusi target lelang dari Kanwil ke KPKNL yang tidak sesuai dengan potensi yang ada/ riil, sehingga untuk Kanwil pokok lelang tercapai tapi untuk KPKNL tidak tercapai.

Faktor Eksternal yaitu :

- Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait lelang khususnya lelang *online*
- Terkait penggalian potensi lelang lainnya di luar Hak Tanggungan seperti lelang sukarela, terkendala dengan kurangnya pengetahuan masyarakat dalam tata cara pengajuan permohonan lelang *online*.
- Tidak tercapainya target pokok lelang karena persepsi dan minat masyarakat tasikmalaya untuk membeli barang secara lelang khususnya property yang masih rendah, banyaknya sanggahan/ gugatan untuk jenis lelang eksekusi hak tanggungan, serta tidak adanya lelang dengan nilai besar (*booming*).

Beberapa hal yang dilakukan KPKNL Tasikmalaya untuk mengatasi kendala tersebut di antaranya:

- Seiring dengan masih merebaknya *Covid-19* di tahun 2021, momentum tersebut dimanfaatkan untuk lebih memperkenalkan lagi lelang secara online (e-auction) melalui portal www.lelang.go.id. dengan sosialisasi yang juga dilaksanakan secara daring kepada masyarakat.
- Pendistribusian target lelang dari Kanwil ke KPKNL di tahun 2021 sudah sesuai dengan potensi yang ada/ riil.
- Program Kedai Lelang UMKM DJKN di tahun 2021 yang bertujuan membantu para penggiat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) akibat adanya pandemic *Covid-19* dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang juga diikuti oleh KPKNL Tasikmalaya dengan program “Jum’at Rakyat di Kedai Lelang UMKM KPKNL Tasikmalaya”, di mana tingginya frekuensi lelang sukarela produk UMKM yang dilaksanakan tersebut ikut berperan mendongkrak capaian IKU produktifitas lelang. Prestasi tersebut juga mengantarkan KPKNL Tasikmalaya menjadi Pemenang (Juara I) pada Kedai Lelang UMKM tingkat nasional.

A.4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai target dan mewujudkan visi dan misi, KPKNL Tasikmalaya dalam hal ini pimpinan organisasi tidak henti-hentinya selalu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada para pegawai untuk melakukan efisiensi baik efisiensi di bidang sarana dan prasarana maupun efisiensi di bidang anggaran. Meskipun ada efisiensi dan penghematan, namun hal ini tidak mempengaruhi kinerja, terbukti dengan adanya penghematan namun target tetap tercapai.

Di sisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, sampai dengan 31 Desember 2021 KPKNL Tasikmalaya mempunyai pegawai berstatus PNS sebanyak 32 pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan dan golongan. KPKNL Tasikmalaya memiliki Pejabat Fungsional Pelelang sebanyak 3 orang, 1 orang di antaranya merupakan hasil *delayering* Pejabat Pengawas/Kepala Seksi Pelayanan Lelang. Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah sebanyak 2 orang, 1 orang di antaranya merupakan hasil *delayering* Pejabat Pengawas/Kepala Seksi Pelayanan Penilaian. Pejabat Fungsional Pranata Keuangan APBN sebanyak 1 orang, serta Juru Sita Piutang Negara yang bertugas di Seksi Piutang Negara sebanyak 1 orang. Selain PNS, juga terdapat 12 orang Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNP) yang bertugas sebagai Pramubhakti, Tenaga Kebersihan, Petugas Keamanan dan *Driver*.

A.5 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Sebagai langkah antisipatif untuk menjaga agar tujuan dan target organisasi bisa tercapai dengan baik, KPKNL Tasikmalaya telah mengambil beberapa langkah atau kebijakan yang dapat mendukung tercapainya target kinerja Tahun 2021, yaitu melakukan sosialisasi tentang tugas dan fungsi serta peranan KPKNL Tasikmalaya, antara lain :

- Melakukan FGD dan sosialisasi, baik secara langsung maupun secara online (webinar) dengan *stakeholder* Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah di seluruh wilayah kerja KPKNL Tasikmalaya.
- Melakukan Sosialisasi dan Publikasi kepada masyarakat luas di antaranya melalui *Public Campaign*, media sosial dan *Press Release* terhadap program-

program yang mendukung peningkatan produktifitas kinerja seperti Publikasi *Crash Program* Keringanan Utang, dan Kedai Lelang UMKM.

- Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada KPKNL Tasikmalaya menjadikan integritas dan peningkatan pelayanan publik menjadi prioritas utama, sehingga terjalin sinergitas yang baik antara KPKNL Tasikmalaya dengan para *stakeholder*/pengguna jasa dan masyarakat yang dampaknya menghasilkan *output/outcome* yang positif dalam peningkatan kinerja.

A.6 Analisis atas pelaksanaan rencana aksi (mitigasi risiko) yang telah disusun dalam pencapaian target

Pada tahun 2021 antara lain atas risiko-risiko sebagai berikut:

- a. Satuan kerja tidak menindaklanjuti persetujuan pengelolaan BMN telah ditangani secara parsial sebab risiko ini hanya ditindaklanjuti dengan hanya memberikan surat himbauan;
- b. Rendahnya kualitas Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) yang diterima dari K/L ditangani optimal baik melalui penyampaian Nota Dinas rencana penugasan, penyampaian surat tugas pelaksanaan penanganan risiko maupun penyampaian Laporan Pelaksanaan Tugas;
- c. Objek lelang tidak dapat dikuasai oleh pembeli lelang telah ditangani optimal dengan penyampaian Surat Tugas dan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Seksi KI;
- d. Adanya pembatalan lelang telah ditindaklanjuti dengan penyampaian surat himbauan kepada Satuan Kerja perihal perlunya ketelitian saat melaksanakan pengajuan permohonan pelaksanaan lelang;
- e. Banyaknya piutang negara yang tidak dapat ditagih telah ditangani optimal dengan melaksanakan penugasan terkait koordinasi dan upaya penagihan kepada debitur disertai penyampaian laporan penugasan kepada Seksi KI.

A.7 Rencana Aksi

Rencana aksi dan atau strategi yang akan dilaksanakan pada periode selanjutnya sebagai berikut:

Terkait penyelesaian BKPN di antaranya sebagai berikut:

- Terhadap seluruh BKPN per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 2.335 berkas kasus piutang negara, dengan *outstanding* sebesar Rp26.765.790.826,91 Seksi PN akan berupaya melakukan pemanggilan kembali atas debitur dan atau penjamin hutang terkait jumlah utang piutang yang masih tercatat dan seyogyanya telah diselesaikan.

- Atas BKPN yang tidak didukung oleh barang jaminan, dan atau ada jaminan namun hanya berupa letter C, Seksi PN akan kembali melaksanakan koordinasi dengan penyerah piutang dalam rangka peningkatan kualitas BKPN. Hal ini untuk meminta Pertanggungjawaban Penyerah Piutang atas upaya mereka dalam melaksanakan penyelesaian BKPN yang diserahkan kepada PUPN dalam hal ini guna menghindari PUPN dijadikan sebagai tempat sampah oleh Penyerah Piutang. Seksi PN berkeyakinan Penyerah Piutang pun memiliki target terkait penyelesaian piutang yang ada pada mereka.
- Diperlukan garis waktu (*time line*) yang jelas dalam pelaksanaan strategi di atas di antaranya:
 - a. Mulai periode Q1 hingga Q4 tahun 2022 dilaksanakan peningkatan atas setiap tahapan pada pengurusan piutang negara.
 - b. Diprioritaskan pada kuartal pertama akan dilakukan upaya pemanggilan baik kepada debitur, penjamin hutang maupun Penyerah Piutang dalam rangka memperoleh gambaran jelas atas penyelesaian BKPN;
 - c. Pelaksanaan koordinasi dengan Penyerah Piutang akan dilaksanakan di kuartal pertama baik secara langsung dengan melakukan kegiatan rapat maupun melalui tata persuratan;

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak dengan nilai total sebesar Rp5.256.313.538,00 dengan rincian PNBPAset sebesar Rp 2.738.822.945,00, PNBPA berupa Bidad PPN sebesar Rp90.367.154,00 dan PNBPA berupa bea lelang sebesar Rp2.427.123.439,00.

Realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp2.078.243.461,00 atau mencapai 96,96% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.143.372.000,00.

BAB IV

PENUTUP

Dari beberapa hal yang sudah diuraikan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa capaian kinerja organisasi KPKNL Tasikmalaya pada Tahun Anggaran 2021 adalah memuaskan. IKU Hasil Lelang dan produktivitas lelang yang pada periode sebelumnya belum mencapai target, saat ini sudah mengalami peningkatan. Berdasarkan kajian terhadap capaian beberapa tahun terakhir terhadap capaian lelang yang tidak pernah mencapai target dapat diakibatkan oleh tingginya target yang ditetapkan. KPKNL Tasikmalaya telah melaksanakan koordinasi dengan Kanwil DJKN Jawa Barat dalam hal penetapan target sehingga target tahun 2021 sesuai dengan potensi yang dimiliki KPKNL Tasikmalaya secara riil. Hal tersebut tentunya akan dilakukan untuk periode selanjutnya untuk target di tahun 2022. Penyebab lainnya tidak adanya lelang dengan nilai besar (*booming*). Secara umum capaian kinerja KPKNL Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 sudah memuaskan, tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang dicapai sebesar 110,76% dengan seluruh IKU berwarna Hijau. Seluruh jajaran KPKNL Tasikmalaya bertekad untuk terus meningkatkan kinerjanya untuk lebih baik lagi di masa yang akan datang.

KPKNL Tasikmalaya akan menerapkan beberapa langkah yang sekiranya akan dapat meningkatkan kinerjanya, antara lain :

1. Membahas dan menyusun rencana kerja yang terukur, dan segera mewujudkannya dalam tindakan yang nyata.
2. Melakukan sosialisasi dalam hal Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara, dan Lelang kepada seluruh satker/pengguna jasa secara terjadwal dan berkesinambungan.
3. Berusaha menyelesaikan progres sertifikasi.
4. Melakukan penggalian potensi piutang daerah (Pemda) agar diserahkan ke KPKNL, dan penggalian potensi ini akan dilakukan secara konsisten.
5. Selalu berusaha menciptakan suasana kantor yang kondusif, suasana yang saling menghormati dan menghargai, komunikasi yang baik dan efektif di antara para pegawai, sehingga akan tercipta suasana yang nyaman, aman dan menyenangkan dalam bekerja.
6. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

7. Selalu berusaha mengembangkan kualitas dan kapasitas SDM, dengan mengikutkan pegawai dalam kegiatan diklat dan *workshop*.
8. Selalu memberikan pengarahan dan pembinaan kepada seluruh pegawai agar dalam bekerja selalu mematuhi SOP yang telah ditetapkan.
9. Selalu menekankan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan dalam setiap aspek pekerjaan, sehingga akan muncul niat baik, rasa ikhlas dan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada para pengguna jasa yang nantinya akan mendukung terciptanya pelayan prima.
10. Selalu mengadakan *knowledge sharing* atau transfer ilmu pengetahuan di antara sesama pegawai.
11. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara terjadwal dan berkesinambungan.
12. Selalu bersama-sama dalam mencari solusi dan pemecahan terbaik terhadap masalah yang timbul.
13. Selalu memberikan pembinaan dan pengarahan serta dukungan dan penghargaan kepada para pegawai sehingga semangat dan motivasi untuk berkinerja baik selalu terjaga.
14. Mengoptimalkan tugas dan fungsi seksi Kepatuhan Internal agar semua proses bisnis bisa terjaga dan sesuai koridor peraturan dan SOP.
15. Dan terakhir selalu menekankan prinsip bahwa kita bekerja melayani orang lain adalah ibadah.